

ABSTRAK

Penelitian ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap Reformasi Birokrasi Kecamatan Banjarsari dalam meningkatkan pelayanan publik. Beban kerja yang berat berdampak terhadap lambanya Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, hal tersebut terjadi karena pemerintah kecamatan harus membawahi 22 Desa dengan luas wilayah 163,07 Km². Pemerintah Kecamatan Banjarsari tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat karena pembangunan yang kurang merata serta jauhnya masyarakat untuk pergi ketempat pelayanan. Sehingga pada akhirnya Kecamatan Banjarsari melakukan sebuah pemekaran wilayah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Banjaranyar.

Peningkatan Kinerja Birokrasi yang dilakukan oleh Kecamatan Banjarsari dianalisis menggunakan teori Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik untuk merepresentasikan hasil dari pemekaran wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dari Miles and Huberman, dengan validitas data yang dipilih yaitu triangulasi data.

Hasil dari penelitian Kecamatan Banjarsari secara formal tidak melakukan Reformasi Birokrasi yang diperkuat tidak adanya dokumen pendukung sebagai barang bukti yang kuat. Namun apabila dilihat dari ciri-ciri Reformasi Birokrasi, Kecamatan Banjarsari melakukan perubahan dengan pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien supaya mudah dijangkau oleh seluruh penduduk masyarakat. Pemekaran wilayah Kecamatan Banjarsari sangat membantu bagi pemerintah untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dekat dan responsif. Pengurangan beban kerja Kecamatan berdampak pada kualitas pelayanan, pemerataan pembangunan dan sebagai faktor terciptanya pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Tugas Kecamatan

ABSTRACT

This research is based on the writer's interest in the Banjarsari District Bureaucratic Reform in improving public services. The heavy workload has an impact on the slow pace of the Government in providing public services, this happens because the sub-district government must oversee 22 villages with an area of 163.07 Km². The Banjarsari District Government was unable to provide satisfactory results to the community due to the uneven development and distance of the community to go to the place of service. So that in the end the Banjarsari Subdistrict conducted an area division into two sub-districts namely the Banjarsari District and the Banjaranyar District.

Improvement of Bureaucracy Performance conducted by Banjarsari Subdistrict was analyzed using Bureaucracy Reformation theory and public services to represent the results of regional expansion. The research method used is descriptive qualitative data collection techniques through interviews, documentation and observation. The data analysis technique used is the data analysis technique from Miles and Huberman, with the validity of the data chosen, triangulation of data.

The results of the Banjarsari District research formally did not carry out the Reformation Reform which was reinforced by the absence of supporting documents as strong evidence. However, when seen from the characteristics of the Bureaucratic Reform, Banjarsari Subdistrict made changes with the division of the region aimed at increasing the acceleration of effective and efficient public services so that they were easily accessible to all residents of the community. The expansion of the Banjarsari Subdistrict region is very helpful for the government to provide maximum contribution in organizing public services and improving community access to get close and responsive services. Reduction of the District's workload has an impact on service quality, equitable development and as a factor in creating good governance.

Keyword : *Bureaucratic Reform, Public Services, Sub-District Duties*